

Studi Tentang Pengentasan Buta Aksara di Kabupaten Sinjai

Sudirman¹, Jamaluddin², Fitrawati AB³

Afiliasi: ^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sinjai

Korespondensi Penulis: 1*fontara68@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengentasan buta aksara di Kabupaten Sinjai yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten sinjai dengan lembaga satuan pendidikan nonformal serta mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data yang telah di peroleh kemudian diolah secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa studi pengentasan buta aksara di Kabupaten Sinjai Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dengan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dalam Percepatan penuntasan buta aksara menggunakan model pembelajaran keaksaraan konvensional dengan menggunakan bahan ajar dalam bahasa Indonesia, dengan buku paket yang disusun secara sentralisasi untuk meningkatkan kemampuan baca tulis dan berhitung (*calistung*). Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengentasan buta aksara adalah kendala internal yang terdiri dari dana kegiatan pengentasan buta aksara yang masih kurang, masih kurangnya PKBM yang terakreditasi menyelenggarakan program keaksaraan dasar, dan belum di masukannya program pengentasan buta aksara pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai serta faktor pendukung pelaksanaan pengentasan buata aksara diantaranya kebijakan sumber daya manusia dan anggaran serta dukungan dari dinas pendidikan Kabupaten Sinjai.

Kata Kunci : Model, Pengentasan, Buta Aksara

ABSTRACT

*This study aims to determine the model of Eradicating Illiteracy in Sinjai Regency carried out by the Sinjai Regency government with non-formal education institutions and to determine the inhibiting and supporting factors, using the Descriptive Qualitative research method. The research data consists of primary data and secondary data obtained using interview techniques, observation and documentation studies. The data that has been obtained is then processed qualitatively. The results of this study indicate that the study of illiteracy eradication in Sinjai Regency The Sinjai Regency Government through the Sinjai Regency Education Office with the community learning activity center (PKBM) in Accelerating the eradication of illiteracy uses a conventional literacy learning model using teaching materials in Indonesian, with textbooks that are compiled centrally to improve reading, writing and arithmetic (*calistung*) skills. The obstacles faced in the implementation of illiteracy eradication are internal obstacles consisting of funds for illiteracy eradication activities that are still lacking, the lack of accredited PKBMs that organize basic literacy programs, and the inclusion of illiteracy eradication programs in the SPM (Minimum Service Standards) of the Sinjai Regency Education Office and supporting factors for the implementation of literacy eradication include human resource policies and budgets and support from the Sinjai Regency Education Office.*

JCOMENT (Journal of Community Empowerment)

EISSN: 2745-875X, Vol. 6 No. 1 (2025): Community Empowerment Hal: 01-10

DOI: 10.55314/jcoment.v6i1.866

Keywords: *Model, Illiteracy, Eradication*

Informasi Artikel: Submit: 24-12-2024 Revisi: 15-1-2025 Diterima: 17-2-2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hal yang utama didalam kehidupan era sekarang ini pendidikan dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada Pasal 5 (1) “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (5) setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dengan demikian pendidikan menjadi hak setiap masyarakat baik pendidikan formal ataupun non formal dan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara. Namun kondisi dan karakteristik geografis, ekonomi serta sosial budaya Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan yang luas dan multikultural , merupakan tantangan untuk terselenggaranya layanan pendidikan yang merata dan bermutu, salah-satu dampaknya adalah terjadinya buta aksara. Masalah masyarakat buta aksara merupakan dinamika yang rata-rata terjadi hampir disetiap negara, terutama negara-negara berkembang dan miskin. Bahkan permasalahan ini merupakan permasalahan paling krusial, setelah permasalahan kemiskinan. Karena memang masyarakat buta aksara sangat rentang terjadi kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan.

Salah satu upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah indonesia untuk menuntaskan buta aksara adalah dengan menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar yang bertujuan untuk melayani penduduk buta aksara supaya memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung dalam bahasa indonesia. Saat ini di Indonesia sudah banyak didirikan macam-macam satuan pendidikan non formal salah satunya yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan pengembangan dan pembelajaran masyarakat yang didasarkan pada kebutuhan warga belajar. warga belajar diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan mereka sendiri berdasarkan kebutuhan yang telah di identifikasikan, memecahkan masalah secara efektif dan melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang lebih sesuai, dimana PKBM menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan bagi warga belajar sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam bidang pendidikan, pendapatan, kesehatan, lingkungan, agama, seni dan budaya di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi

Selatan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagaimana ditulis oleh (Masykur. 2018) dalam portal berita online, menjelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam sepuluh besar sebagai Provinsi di Indonesia yang memiliki angka buta huruf atau aksara diatas angka nasional bersama tiga provinsi di pulau Sulawesi lainnya yaitu Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Hampir seluruh Kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan masyarakatnya banyak yang buta aksara. Tahun 2016, terdapat 16 Kabupaten kota yang berhasil meningkatkan angka melek atau paham aksara mencapai angka diatas 95%. 16 Kabupaten tersebut diantaranya adalah Barru, Pare- Pare, Pinrang, Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Sidrap, Soppeng, Wajo, Bone, Bulukumba dan Makassar.

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Sinjai merupakan salah satu Kabupaten yang gagal meningkatkan angka melek diatas 95%. kemudian berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai sebagaimana ditulis (Irman Bagosen, 2019) dalam berita online bahwa angka buta aksara di Kabupaten sinjai mencapai 17 ribu jiwa. Namun data berbeda kemudian disebutkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai pada tanggal 16 januari 2019 sebagaimana ditulis (Samsul Bahri, 2019) dalam berita online bahwa ada 5.727 warga Sinjai buta huruf, terbanyak di Sinjai Borong dan Tellulimpoe. dengan persentase 100% dari sembilan Kecamatan.

Meskipun dalam angka menunjukkan peningkatan angka melek aksara sebesar 4% dan telah menerima Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) namun peningkatan tersebut masih tergolong belum maksimal karna peningkatannya yang belum signifikan dari besaran persentase angka buta aksara di Kabupaten Sinjai.

Masalahnya adalah belum ada produk hukum berupa PERBUP atau PERDA yang lahir dan membahas secara khusus tentang pemberantasan buta aksara. Namun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Sinjai menjalankan program-program pendidikannya kemasyarakatan berdasarkan izin bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) namun berdasarkan hasil observasi awal

pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai terdapat 16 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) namun yang aktif melakukan kegiatan pemberantasan buta aksara hanya terdapat 3 PKBM diantaranya PKBM Todilaling, Panrita kitta, dan Batu Tellue.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melihat dan melakukan penelitian terkait hal tersebut diatas dengan judul “Studi tentang pengentasan buta aksara di Kabupaten Sinjai” Sesuai dengan disiplin ilmu penulis yaitu Administrasi Publik penelitian ini mengarah kepada kebijakan dan pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “studi tentang Pengentasan Buta Aksara di Kabupaten Sinjai ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanasi. Creswell menyatakan penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan serangkaian metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemasyarakatan (Creswell, 2019). Penelitian berupaya mengkaji secara mendalam, tetapi dalam konteks alamiah dan menyeluruh terhadap fenomena atau obyek yang diteliti. Penelitian ini berupaya mendapatkan informasi dari para aktor (*key informan*) yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap perspektif dan pandangan para aktor yang terlibat dapat tanpa meninggalkan kriteria masyarakat adat dapat menggambarkan secara komprehensif realitas fenomena yang terkait dengan studi tentang pengentasan buta aksara di Kabupaten Sinjai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Model Pengentasan Buta Aksara di Kabupaten Sinjai

Hakikat pembangunan manusia adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat agar mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Untuk mencapai masyarakat sejahtera barometer utamanya adalah pendidikan. Keterbelakangan pendidikan akan mengakibatkan terlambatnya menyerap informasi yang berkaitan dengan kemajuan, terlebih lagi mereka yang buta huruf sangatlah sulit untuk berkompetitif, mereka juga tidak dapat berkesempatan memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak serta kurang dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan.

Dalam upaya meningkatkan tingkat keaksaraan masyarakatnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Perangkat Daerah terkait menyelenggarakan program pemberantasan buta aksara dengan bentuk- bentuk pembelajaran yang sesuai dengan keadaan di lingkungan wilayah sekitar tempat tinggal warga belajar, agar warga belajar mampu menulis, membaca, berhitung serta menganalisis tematik.

Dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan buta aksara ini, Pemerintah Kabupaten Sinjai masih mengikuti program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dan membangun sinergi dengan pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM) yang menangani pemberantasan buta aksara dengan bentuk-bentuk kerjasama seperti pelaksanaan program keaksaraan dasar, keaksaraan fungsional paket A,B dan C.

Tabel Jumlah Penduduk Buta Aksara Usia 15-59 Tahun
Kabupaten Sinjai Pada Awal Tahun 2022

| No | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | PULAU SEMBILAN | 116 | 175 | 291 |
| 2 | BULUPPODDO | 205 | 176 | 381 |
| 3 | SINJAI BARAT | 202 | 206 | 408 |
| 4 | SINJAI BORONG | 226 | 206 | 432 |
| 5 | SINJAI SELATAN | 103 | 91 | 194 |
| 6 | SINJAI TENGAH | 235 | 65 | 300 |
| 7 | SINJAI TIMUR | 122 | 170 | 282 |
| 8 | SINJAI UTARA | 244 | 252 | 496 |
| 9 | TELLULIMPOE | 323 | 398 | 721 |
| JUMLAH | | 1766 | 1739 | 3505 |

Sumber : Bagian PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dinas pendidikan kabupaten sinjai dan PKMB berhasil meningkatkan angka melek aksara di tahun 2019 yaitu sebanyak 700 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 1.150 orang, 2021 sebanyak 700 orang, dan tahun 2022 sebanyak 504 orang yang telah diberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

Tahapan pelaksanaan pengentasan buta aksara yang dilakukan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai) dan Lembaga Pendidikan Non Formal (PKBM) dalam pengentasan buta aksara di Kabupaten Sinjai, dalam penelitian ini penulis memilih

beberapa indikator diantaranya, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian.

Tabel Daftar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Yang menyelenggarakan Program Keaksaraan Dasar

| No. | Nama PKBM | Alamat | Nomor Izin Penyelenggaraan |
|-----|--------------------|---|-------------------------------|
| 1 | PKBM Batu Tellue | Lingkungan, Lempakomai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara | 002/PKBM/01/II/2020 |
| 2 | PKBM Panrita Kitta | Tokinjong, kelurahan balangnipa, kecamatan Sinjai utara | 00322/22/02/DPMPPTSP/III/2024 |
| 3 | PKBM Todilaling | Jl. Amanagappa, Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara | c-66.HT.03.01-Tn.1997 |

Sumber : PKBM di Kabupaten Sinjai

2. Faktor Determinan Pengentasan Buta Aksara di Kabupaten Sinjai

Dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan dan kegiatan tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, begitu juga dalam studi pengentasan buta aksara di Kabupaten Sinjai. Faktor-faktor tersebut penulis uraikan dalam 2 (dua) jenis yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung merujuk pada elemen atau kondisi serta kebijakan yang membantu dan memperkuat suatu proses kegiatan atau pencapaian tujuan tertentu seperti adanya warga belajar, fasilitas dan sarana pembelajaran yang memadai juga sumber daya manusia baik dari kuantitas maupun kualitas cukup mendukung. Sedangkan faktor penghambat diketahui bahwa Dinas Pendidikan dalam hal mengatasi buta aksara di Kabupaten Sinjai adalah belum sepenuhnya di daerah Kabupaten Sinjai memiliki Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta program pengentasan buta aksara belum masuk pada standar pelayanan minimal di Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, selain itu juga dari kebijakan pemerintah belum adanya kebijakan yang secara otonom membahas dan mengatur secara khusus tentang percepatan penanganan stunting di kabupaten sinjai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data-data yang diperoleh, serta hasil wawancara maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai bahwa dalam studi pengentasan buta aksara di Kabupaten Sinjai Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam Percepatan penuntasan buta aksara menggunakan model pembelajaran keaksaraan konvensional dengan menggunakan bahan ajar dalam bahasa Indonesia, dengan buku paket yang disusun secara sentralisasi untuk meningkatkan kemampuan baca tulis dan berhitung (*calistung*).

Sementara itu pengentasan buta aksara di Kabupaten Sinjai dipengaruhi oleh dua faktor determinan adapun faktor determinan tersebut diantaranya, faktor pendukung yang meliputi, biaya operasional dari pemerintah, tutor yang menjangkau tanggung jawab dengan baik, adanya warga belajar, tempat pembelajaran, selain itu faktor penghambat yang meliputi, belum sepenuhnya daerah di Kabupaten Sinjai memiliki PKBM, data yang berbeda antara Badan Pusat Statistik dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, kurangnya motivasi warga belajar untuk mengikuti pembelajaran, medan (kondisi jalanan dan jarak yang tidak begitu dekat), faktor lingkungan, faktor ekonomi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya jurnal ini. Terima kasih kepada pembimbing, keluarga, rekan-rekan, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta kontribusi selama proses penulisan jurnal ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Angraini, W. W. (2017). Efektivitas Program Pendidikan Luar Sekolah Dalam Kejar Paket C Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “Variant Centre” Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. *Media Analisa Masalah Administrasi*, 39–51.

Arifin, M. Z., & Damaianti, V. S. (2018). Model pembelajaran keaksaraan fungsional melalui pendekatan lea berbasis pola asuh keluarga dalam penuntasan tunaakhsara masyarakat miskin perdesaan. *In Seminar Internasional Riksa Bahasa*, 239–250.

Bevir, M. (2006). Democratic governance: Systems and radical perspectives. *Public Administration Review*, 66(3), 426–436.

Halim, D., & Munthe, A. P. (2019). Dampak Pengembangan buku cerita bergambar untuk

- anak usia dini. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 9(3), 203–216.
- HARPENDI, R. (2021). MENCIPTAKAN SMART ASN MENUJU 4.0 DI KANTOR CAMAT KECAMATAN HAMPARAN RAWANG KOTA SUNGAI PENUH. *URNAL ADMINISTRASI NUSANTARA MAHA*, 3(1), 73–85.
- Irawan, B. (2006). Fenomena anomali iklim El Nino dan La Nina: kecenderungan jangka panjang dan pengaruhnya terhadap produksi pangan. *In Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 24(1), 28–45.
- Jørgensen, S. E., & Halling-Sørensen, B. (2000). Drugs in the environment. *Chemosphere*, 40(7), 691–699.
- Lay, C., & Mas' udi, W. (2005). Perkembangan Kajian Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 225–240.
- Lay, C., & Masudi, W. (2005). Perkembangan Kajian Ilmu Pemerintahan. *In Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 9, Issue 2, pp. 225–240).
- Murhekar, Manoj V., et al. (2020). Prevalence of SARS-CoV-2 infection in India: Findings from the national serosurvey, May-June 2020. *Indian Journal of Medical Research*, 152(1–2), 48–60.
- MUSALIFAH, S. (2021). *EFEKTIFITAS KONSELING INTEGRATIF UNTUK MEREDUKSI PERILAKU AGRESIF PESERTA DIDIK MTsN 2 KOTA SAWAHLUNTO*.
- Quade, J., Cerling, T. E., & Bowman, J. R. (1989). Development of Asian monsoon revealed by marked ecological shift during the latest Miocene in northern Pakistan. *Nature*, 342(6246), 163–166.
- Rahmat, H. K., & Kurniadi, A. (2020). Integrasi dan interkoneksi antara pendidikan kebencanaan dan nilai-nilai Qur'ani dalam upaya pengurangan risiko bencana di sekolah menengah pertama. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2, 455–461.
- Rizal, H. S. (2019). Inovasi Pelayanan Pengurusan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Pinang Balai Karimun Provinsi Riau. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau*.
- Vollenberg, M., Kenis, P., & Raab, J. (2007). A case-study on network structure and network effectiveness of a Dutch mental health care network. *In 9th Public Management Research Conference, Tucson, Arizona October*.
- Wardani, S. K. K. (2018). Implementasi program keaksaraan dasar dalam memberantas buta aksara di PKBM Gilang Tiara Desa Muktijaya Bekasi. *Aachelor's Thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah*.
- Widayati, T., & O Dollar Sihombing, W. (2012). Pengembangan Bahan Belajar Keaksaraan Berbasis Cerita Rakyat Kutai Kalimantan Timur. *IV-Jurnal Ilmiah Visi*, 7(1), 8–17.
- Arikunto, S. (1998). Pendekatan Penelitian. *Rineka Cipta*.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

JCOMMENT (Journal of Community Empowerment)

EISSN: 2745-875X, Vol. 6 No. 1 (2025): Community Empowerment Hal: 01-10

DOI: 10.55314/jcoment.v6i1.866

Moleong, L. J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Cetakan 34. Ed. PT Remaja Rosdakarya.*